

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, Jakarta: Prenda Media Group , 2014.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra SH, Ir. A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- H.P.Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung : PT. Alumni Bandung, 2014.

- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajagrafindo Persada : 2020
- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Karakteristik ilmu hukum dan metode penelitian hukum normatif*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2021.
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan 2003.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Rachmat Trijono, *Pegantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Sinanti, 2014.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung : Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta : Radjawali Pers, 2011
- Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Binapura Aksara, 2008.
- Siagian, *Pokok-Pokok Pengawasan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Jogjakarta : Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 2006.

Sutjipto Raharjo, *Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Irregularity)*, Pidato Mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

Sunaryati Hartono dalam Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Jakarta: Sofmedia, 2011.

Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Widodo Suryandono, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, Jakarta : YayasanPustaka Obor Indonesia, 2017.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Wenny A. Dungga, *Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, Januari 2019.

Zainal asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Zaeni Ashyadie, *Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

II. Jurnal dan Artikel

Asri wijayanti, *Kejahatan Korporasi Dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh*, *Jurnal Hukum Equality*, Vol.16 No.1 Februari 2011.

Aristo Prima, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, *Jurnal Mercatoria* Vol. 9 No. 2/Desember 2016.

- Anggi Restiasari, R. Ismadi S. Bkti, dan Ahmad Gozali, Kepastian Hukum Apotek Rakyat Dan Pekerjaan Kefarmasian, *Jurnal Hukum Kesehatan* Vo.3, No.1, 2017.
- Ariani, Nevey Varida, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
- Asri Wijayanti, “Reformasi Pengaturan Outsourcing”,*Law Review*,Vol.XII No.1-Juli 2012
- Aris Septiono,Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, 2013
- Dewi Indasari Hulima, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Pesangon Oleh Perusahaan Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Jurnal LexPrivatum* Vol.V, No. 6 Agustus 2017.
- Dungga, W. A., & Tome, A. H. “Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo”. *Jambura Law Review*, 1(1), 2019.
- De Haan, Bestuurecht in de Siciële Rechstaat, Ontwikkeling Organisatie Instrumentarium, Kluwer. Deventer, 1996 dalam Lanny Ramly, “Karakter Yuridis Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010.
- Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*,Vol.8 No.2, 2016.
- Failis, “Pemidanaan Orang Tua Yang Memperkerjakan Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Lex Crimen* 2018
- Heavenly Sherand Tetehuka, Tindak Pidana Kejahatan Di Bidang Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Lex Crimen* Vol. VIII,No. 6 Juni 2019.
- I Kadek Indyana Pranantha, Anak Agung Sri Utari, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Perlindungan Disabilitas”, *Kertha Negara*, Vol.04, No.05, Juli 2016, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21995/14588>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022, pada pukul 20.45 WIB

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, 1997.

Payaman J. Simanjuntak, "Reformasi Sistem Pengupahan Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol.5 No. 2, Tahun 2004.

M.Amin, Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Tesis, Pontianak: Untan, 2016.

Mohammad Fandrian Hadistianto, Praktek Pengawasan Perburuhan Dalam Konteks Penegakan Hukum Perburuhan Heteronom, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No.2 2017.

M.Imam Tarmudzi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.1, No.2 2015

Nazaruddin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review* Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2017.

R A Aisyah Putri Permatasari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di PHK Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Februari 2018.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 176.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 5

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 12

Lihat undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

R.I., Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB XIV, Pasal 179

IV. Lain-Lain/Website

Adrian Walil Akhlah, 24 Februari 2020, "*5 things you need to know about omnibus bill on taxation*", The Jakarta Post, Diakses tanggal 27 Mei 2023

Achmad Nasrudin Yahya, 7 Oktober 2020, "*Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh-halaman all.*", KOMPAS.com, Diakses tanggal 27 Mei 2023

Ade Miranti Karunia, 7 Oktober 2020, "*UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!*". KOMPAS.com. Diakses tanggal 26 Mei 2023

Dipna Videlia Putsanra, 7 Oktober 2020, "*Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah*", Tirto.id, Diakses tanggal 26 Mei 2023

Lauretta, "Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan", Diakses Melalui http://lauretta15lawsource.blogspot.co.id/2013/06/bab-ii-ruang-lingkup-hukum_25.html, Tanggal 14 Agustus 2022.

Lembar Fakta : Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia. <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asiaro-bangkok/ilo>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

<http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 10 April 2023

<http://bundaliainsidi.blogspot.com/2013/03/pengertian-tenaga-kerja-menurutpara.html>, di akses pada tanggal 18 September 2022